

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kebijakan Fiskal**

#### **1. Definisi Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan, yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut, dalam tataran praktisnya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan fiskal kepada aktivitas ekonomi negara sangatlah luas. Berbagai indikator

ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak kebijakan fiskal kepada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif. Namun secara teori, kebijakan fiskal mengembang yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan defisit anggaran (Sriyana, 2005).

Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimalkan kesejahteraan ekonomi (Madjid, Kemenkeu RI 2012). Kebijakan fiskal sering didefinisikan sebagai pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua level pemerintahan (Govil, 2009).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN sebagai suatu rencana operasi keuangan pemerintah.

- a. Peningkatan penerimaan karena perubahan tarif pajak akan berpengaruh pada ekonomi.
- b. Pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada stimulasi pada perekonomian melalui dampaknya terhadap sisi pengeluaran agregat,
- c. Politik anggaran (surplus, berimbang, atau defisit) sebagai respon atas suatu kondisi, serta
- d. Strategi pembiayaan dan pengelolaan hutang (Kebijakan Fiskal Dan Penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran).

Definisi lain menyebutkan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang pemerintah (Basri, 2003 : 23) . Secara singkat dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah, kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mengelola anggaran dalam mempengaruhi perekonomian serta memaksimalkan kesejahteraan dan stabilitas dalam bidang perekonomian. Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar (Basri, 2003: 26)

1. Pembiayaan fungsional (*functional finance*)
2. Pengelolaan anggaran (*the managed budget approach*)
3. Stabilisasi anggaran otomatis (*the stabilization budget*)
4. Anggaran belanja seimbang (*balanced budget approach*)

Secara singkat, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen-instrumen

fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimalkan kesejahteraan ekonomi (Tanzi, 1991 dalam Madjid).

## **2. Orientasi Kebijakan Fiskal**

Setelah krisis multi-dimensi 1997, kebijakan fiskal yang ditempuh oleh pemerintah diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu untuk mendukung konsolidasi fiskal guna mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan untuk menciptakan ruang gerak fiskal (*fiscal space*)<sup>1</sup> yang memadai guna memperkuat stimulus fiskal. sehingga mampu menggerakkan perekonomian domestik. Kedua sasaran tersebut masih tetap menjadi prioritas kebijakan dalam tahun-tahun selanjutnya. Dalam periode 2000 – 2009, upaya pencapaian sasaran kebijakan fiskal tersebut dibagi menjadi fase konsolidasi (penyehatan) APBN dalam periode 2000 – 2005 dan fase stimulus fiskal dalam periode 2006 – 2009.

Secara operasional, konsolidasi fiskal (penyehatan APBN) diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, peningkatan pendapatan negara yang dititikberatkan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). *Kedua*, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. *Ketiga*, pengelolaan utang negara yang sehat dalam rangka menutupi kesenjangan pembiayaan anggaran yang dihadapi pemerintah. *Keempat*, perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara, dengan memperbesar peranan sektor pajak nonmigas, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran. *Kelima*

pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan, yang dilakukan antara lain melalui perbaikan manajemen pengeluaran negara. Sementara itu, penguatan stimulus fiskal terutama diupayakan melalui optimalisasi belanja negara untuk sarana dan prasarana pembangunan, alokasi belanja negara untuk kegiatan-kegiatan dan sektor-sektor yang mampu menggerakkan perekonomian, serta pemberian insentif fiskal (perpajakan) (Nizar, 2010).

### **3. Fungsi Kebijakan Fiskal**

Pemerintah terkadang memfokuskan pada tujuan-tujuan yang lebih spesifik agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Tanzi, 1991 dalam Madjid). Tujuan-tujuan spesifik dari kebijakan fiskal tersebut antara lain:

- a. Koreksi atas ketidakseimbangan sementara,
- b. Stimulasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan
- c. Redistribusi pendapatan.

Dengan berbagai tujuan spesifik tersebut, maka secara bersamaan terdapat kebijakan fiskal jangka pendek atau stabilisasi, dan kebijakan fiskal jangka panjang. Hal ini terutama karena di dalam kenyataan, kebanyakan dari langkahlangkah kebijakan fiskal jangka pendek juga mempunyai konsekuensi jangka panjang, dan dengan cara yang sama berbagai langkah kebijakan fiskal jangka panjang juga mempunyai implikasi-implikasi jangka pendek. Berdasarkan berbagai tujuan tersebut, terdapat tiga aktivitas utama dari otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi-fungsi spesifik dari kebijakan fiskal. Ketiga fungsi spesifik

dari kebijakan fiskal itu adalah fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave, 1959). Ketiga cabang ekonomi dari pemerintah (Musgrave) adalah sebagai berikut:

### **1) Stabilisasi**

Tanggung jawabnya adalah menjamin perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (*full employment*) dengan harga yang stabil. Tujuan utama dari fungsi stabilisasi kebijakan fiskal adalah memelihara tingkat pendapatan nasional aktual mendekati potensialnya. Dengan tujuan seperti itu, maka “kebijakan stabilisasi” seringkali dimaknai sebagai manipulasi dari permintaan agregat agar pada saat yang sama mencapai *full employment* dan stabilitas harga (*price stability*).

### **2) Alokasi**

Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Intervensi pemerintah ini dapat dilakukan dengan secara langsung membeli barang-barang seperti pertahanan dan pendidikan, dan secara tidak langsung melalui berbagai pajak dan subsidi subsidi, yang mendorong berbagai aktivitas atau menghambat aktivitas-aktivitas lainnya.

### **3) Distribusi**

Berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan diantara anggota-anggotanya, berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan, dan *trade-offs* antara pemerataan dan efisiensi.

Namun demikian, fungsi kebijakan fiskal lebih jelas ketika meminimalisir volatilitas atau fluktuasi siklus bisnis, dimana fungsi “stabilisasi” sangat dibutuhkan perekonomian. Dalam kerangka fungsi stabilisasi tersebut diatas, kebijakan fiskal dipandang sebagai alat yang sangat ampuh dalam membantu memperkecil siklus bisnis. Mengingat sumber penyebab terjadinya fluktuasi ekonomi jangka pendek berasal dari guncangan permintaan agregat dan penawaran agregat, maka usaha untuk mengendalikan fluktuasi siklus bisnis seharusnya dilakukan dengan mengendalikan permintaan agregat dan penawaran agregat melalui berbagai instrumen kebijakan ekonomi makro, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal yang tepat. Kebijakan-kebijakan ini mempengaruhi siklus bisnis, sehingga sangat berpotensi menstabilkan perekonomian dari berbagai fluktuasi siklus bisnis jika dilaksanakan secara baik, tepat, akurat, dan *prudent*. Sebaliknya, jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak dijalankan dan dikelola dengan baik, justru akan dapat menciptakan masalah baru pada ketidakstabilan ekonomi yang bukan tidak mungkin bahkan akan lebih buruk lagi (Mankiw, 2007).

Pendapat lain mengenai fungsi kebijakan fiskal adalah menurut Romer (1996) dalam Hendrin H. Sawitri, secara simultan fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi makro ekonomi secara kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah pengangguran, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong distribusi pendapatan yang semakin merata.

John F. Due dalam Ani Sri Rahayu, mengatakan terdapat tiga tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu :

- a. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- b. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga – harga secara umum.
- c. Untuk menstabilkan harga – harga secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia sebagai negara berkembang adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dengan menggunakan instrumen anggaran defisit. Karena APBN merupakan alat dari kebijakan fiskal, maka pengelolaan anggaran baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran menjadi hal yang penting, agar kebijakan fiskal yang ekspansif dengan anggaran yang defisit ini tidak akan menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Merumuskan strategi pembiayaan anggaran yang tepat dan terkendali menjadi perlu dilaksanakan agar anggaran tetap sehat, dapat dipercaya (*credible*) dan berkesinambungan (*sustainable*).

Kebijaksanaan fiskal dapat dilihat dari struktur pos-pos APBN. Dimana APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan untuk pelaksanaannya. Dalam praktek macam pos-pos yang tercantum di sisi ini sangat beraneka ragam dan mencerminkan apa yang ingin

dilaksanakan pemerintah dalam programnya, antara lain (Boediono,1986 dalam Pamuji)

## **B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

### **1. Definisi APBN**

Keuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban Negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (budgeting atau penganggaran). Anggaran ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pedoman dalam mengelola Negara dalam periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah dan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilih.

Di Indonesia pada awalnya secara resmi digunakan istilah begrooting untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun sejak Proklamasi Kemerdekaan, digunakan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan dalam perkembangannya ditambahkan kata Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sehingga penyelenggara Negara (Pemerintah) setiap tahun mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN untuk dibahas bersama

DPR. Jika disetujui maka RUU tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

## **2. Format APBN :**

Sebelumnya dalam bentuk T-Account (1966-1999) Menyerupai neraca perusahaan, di mana terdapat keseimbangan antara bagian aset (penerimaan dengan pengeluaran, tanpa mempersoalkan ada tidaknya defisit).

- a. Anggaran berimbang
- b. Tahun anggaran 1 April – 31 Maret tahun berikutnya

Sekarang dalam bentuk I-account, mulai tahun 2000

- a. Dibuat satu lajur, bagian atas penerimaan dan bagian bawah pengeluaran, langsung menunjukkan ada nya defisit dan pendanaannya
- b. Anggaran tidak berimbang
- c. Tahun anggaran 1 Januari – 31 Desember.

## **3. Klasifikasi Belanja**

- a. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan :
  - 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Dalam Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa APBN yang telah disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
  - 2) PP Akuntansi Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat meliputi belanja operasi (belanja

pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), belanja modal, belanja lain-lain. Klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

b. Menurut fungsi artinya klasifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Rincian belanja Negara menurut fungsi<sup>1</sup> antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial, disesuaikan dengan tugas masing-masing Kementerian Negara atau Lembaga. Oleh karena itu program kementerian negara atau lembaga harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

c. Menurut jenis belanja

Pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan untuk pelaksanaannya :

a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa,  
b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai,  
c) Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payments* yang meliputi misalnya, pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Selain itu semua pos pada sisi pengeluaran tersebut memerlukan dana untuk melaksanakannya. Sisi penerimaan menunjukkan dari mana dana yang diperlukan tersebut diperoleh. Ada empat sumber utama untuk memperoleh dana tersebut, yaitu (Boediono, 1986 dalam Pamuji):

- a) Pajak berbagai macam,
- b) Pinjaman dari bank sentral,
- c) Pinjaman dari masyarakat dalam negeri,
- d) Pinjaman dari luar negeri.

Selanjutnya, dari pos-pos anggaran tersebut akan terlihat dampak kebijakan fiskal untuk perekonomian nasional. Dengan kata lain, suatu kebijakan fiskal adalah suatu aliran kombinasi pos-pos APBN dengan berbagai mekanisme, yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan

## **C. Teori Pengeluaran Pemerintah**

### **1. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk

meleksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari pendekatan teori makro (Basri dan Subri, 2003).

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

**a) Hukum Wagner**

Berdasarkan pengalaman empiris dari negara – negara maju (USA, Jerman, Jepang), Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meskipun demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Kelemahan hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik, tetapi Wagner mendasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

**b) Teori Peacock dan Wiserman**

Teori Peacock dan Wiserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami

besarnya pungutan pajak dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori Peacock dan Wiserman, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pada tingkat sebelum adanya gangguan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan karena pemerintah harus mengembalikan angsuran utang dan bunga pinjaman untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GDP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya.

Menurut Dr.Guritno Mangkoesoe-broto, M.Ec, perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Perubahan permintaan akan barang publik.
- b. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang publik.
- d. Perubahan harga faktor-faktor produksi

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap penghasilan nasional. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (current expenditure), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Sebaliknya terdapat elemen pengeluaran pembangunan yang sebagian besar merupakan

pengeluaran untuk investasi (capital expenditure) dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang bersifat konsumsi, seperti berbagai jenis upah dan gaji tambahan. Dari kedua jenis pengeluaran tersebut, pengeluaran pembangunanlah yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto nasional yang dilakukan pemerintah pusat (Matriks Investasi Pemerintah BPS).

Pengeluaran Pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan terutama untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atau konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sadono Sukirno, 2004).

Konsumsi pemerintah adalah pembelian atas pembelian barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji, membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi, memberikan subsidi-subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah atas produk nasional karena pengeluaran itu bukanlah untuk membeli barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia tercermin dalam pengeluaran rutin, sedangkan pengeluaran investasi pemerintah tercermin dalam pengeluaran pembangunan.

Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (current expenditure). misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah ini secara tidak langsung merupakan investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut masalah pemilihan prioritas pengeluaran pembangunan tersebut merupakan hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun rencana anggaran pembangunannya.

## **2. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi: (Suparmoko, 2000)

- a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Berdasarkan atas penilaian ini kita dapat membedakan bermacam-macam pengeluaran negara

seperti: Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.

- b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (*public health*).
- c. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek *tourisme* dan sebagainya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.
- d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu:(Dumairy, 2001)

- a. Pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen / lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.
- b. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

## **D. Pertumbuhan Ekonomi**

### **1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi**

Pengertian pertumbuhan ekonomi sudah banyak dirumuskan dengan sudut pandang yang berbeda oleh para ekonom. Simon Kuznets (1971) dalam Todaro dan Stephen C Smith (2000) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Boediono (1999) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Penekanan di sini adalah pada proses karena mengandung unsur perubahan dan indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama.

Menurut Sadono Sukirno (1985), pengertian pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan

ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam PDRB, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk.

Samuelson (1995) dalam Sriyana mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/*output* dari suatu negara. Ada 4 faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi:

1. Sumber daya manusia.

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, keterampilan produksi, dan keahlian yang hanya bisa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik.

2. Sumber daya alam.

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting antara lain minyak, gas, hutan, air dan bahan-bahan mineral lainnya.

### 3. Pembentukan modal.

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. Pembentukan modal modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kemajuan cepat di bidang ekonomi.

### 4. Perubahan teknologi dan inovasi.

Salah satu tugas kunci pembangunan ekonomi adalah memacu semangat kewiraswastaan. Perokonomian akan sulit untuk maju apabila tidak memiliki para wiraswastawan yang bersedia menanggung resiko usaha dengan mendirikan berbagai pabrik atau fasilitas produksi, menerapkan teknologi baru, mengadapi berbagai hambatan usaha, hingga mengimpor berbagai cara dan teknik usaha yang lebih maju.

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan peningkatan output dan pendapatan riil perkapita memang bukanlah satu-satunya sasaran kebijaksanaan di negara-negara berkembang, namun kebijaksanaan ekonomi menaikkan tingkat pertumbuhan output perlu dilakukan karena:

1. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat yang sangat diperlukan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu prasyarat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, seperti: peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat, ataupun penyediaan fasilitas dan sarana sosial lainnya (Thirwall: 1976 dalam Rika).

## 2. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan secara umum terbagi dalam tiga kelompok pendekatan yaitu pendekatan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan Jhon Stuart Mill, Neo Klasik (Solow-Swan, Schumpeter dan Alfred Marshall) dan modern yang dianut oleh Rostow, Harrod-Domar, Kutznet dan teori ketergantungan.

### a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik di pelopori oleh beberapa tokoh yaitu, Adam Smith, David Ricardo, dan Arthur Lewis. Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*”, mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Menurut pandangan Adam Smith, kebijaksanaan *Laissezfaire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Adam Smith mengemukakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif.

Teori ini dikembangkan oleh Abramovitz dan Solow yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi.

Teori ini pada hakekatnya menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor-faktor berikut, yakni :

1. Pertambahan modal dan produktifitas marginal
2. Pertambahan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja margina
3. Perkembangan tekhnologi

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis pengembangan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan yang memunculkan teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

1. Teori Pertumbuhan Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:

- a) Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan dan sikap yang masih primitif, dan berfikir irasional.
- b) Prasyarat lepas landas, adalah suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai

pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*self-sustained growth*).

- c) Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru.
- d) Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.
- e) Masyarakat berkonsumsi tinggi, adalah suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

## 2. Teori Pertumbuhan Kuznet

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaianpenyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada.

Masing-masing dari ketiga komponen pokok, yaitu:

- a. Kenaikan *output* secara berkesinambungan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi (*economic maturity*) di suatu negara yang bersangkutan.

- b. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi, disamping perkembangan atau kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain).
- c. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi di bidang teknologi tanpa dibarengi inovasi sosial berarti potensi ada, akan tetapi tanpa *input* komplementernya maka hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun.

### 3. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar, ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal dan jumlah produksi nasional. Adapun model pertumbuhan ekonomi yang bisa ditunjukkan berdasarkan teori Harrod Domar adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan ( $S$ ) merupakan suatu proporsi ( $s$ ) dari *output* total ( $Y$ ), oleh karenanya nilai mempunyai persamaan yang sederhana:

$$S = s \cdot Y \dots\dots\dots(2.2)$$

- b. Investasi didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan  $\Delta K$ , maka:

$$I = \Delta K \dots\dots\dots (2.3)$$

Tetapi karena stok modal ( $\Delta K$ ) mempunyai hubungan langsung dengan *output* total ( $Y$ ), seperti ditunjukkan oleh COR atau  $k$ , maka:

$$K/Y = k \text{ atau } \Delta K/\Delta Y = k \text{ atau } K = k \cdot Y \dots\dots\dots(2.4)$$

- c. Akhirnya karena tabungan total ( $S$ ) harus sama dengan investasi total ( $I$ ), maka:

$$S = I \dots\dots\dots(2.5)$$

Akhirnya kita akan mendapatkan :

$$\Delta Y/Y = s/k \dots\dots\dots (2.6)$$

#### 4. Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan ini pertama kali dikembangkan di Amerika Latin pada tahun 1960-an. Menurut para pengikut teori ini, keterbelakangan (*underdevelopment*) negara-negara Amerika Latin terjadi pada saat masyarakat prapitalis tersebut tergabung ke dalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Dengan demikian masyarakat tersebut kehilangan otonominya dan menjadi daerah pinggiran dari daerah-daerah metropolitan yang kapitalis. Dalam teori ketergantungan ini ada dua aliran yaitu aliran Marxis-Neo Marxis dan aliran Non-Marxis. Aliran yang pertama menggunakan kerangka teori imperialisme yang tidak membedakan secara tajam antara struktur internal dan eksternal, karena kedua struktur tersebut dipandang

sebagai faktor yang berasal dari sistem kapitalis dunia itu sendiri. Selain itu, aliran ini mengambil perspektif perjuangan internasional antara pemilik modal dengan kaum buruh. Oleh karena itu, menurut teori ini, pembangunan ekonomi untuk daerah pinggiran adalah dengan cara melakukan revolusi. Sedangkan aliran kedua melihat masalah ketergantungan dari perspektif nasional atau regional. Di mana aliran ini dengan tegas membedakan keadaan di dalam negeri dan luar negeri. Menurut aliran ini, struktur dan kondisi internal dilihat sebagai faktor yang berasal dari sistem itu sendiri walaupun tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sehingga yang perlu ditekankan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi adalah melakukan pembaharuan yang diperlukan secara internal untuk menentukan sikap terhadap faktor eksternal.

#### **E. Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini dinyatakan dalam pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pembangunan tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Pengeluaran pembangunan juga merupakan salah satu *input* produksi yang dapat menghasilkan *output*. Pengeluaran rutin mempunyai peranan dan fungsi cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekalipun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan menunjang kegiatan pemerintahan serta peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan. Secara agregat, peningkatan pengeluaran pemerintah akan ikut

menambah pendapatan nasional sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Seperti telah diketahui, pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (current expenditure), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi ( Rika, 2011).

## **F. Tinjauan Empiris**

### **1. Darma Rika Swaramarinda, Susi Indriani (2011)**

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Model ekonometrik penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 Gc_t + \beta_2 Gi_t + e_t$$

Keterrangan:

$Y_t$  = pertumbuhan ekonomi pada tahun t

$Gc$  = rasio konsumsi pemerintah terhadap PDB pada tahun t

$Gi$  = rasio investasi pemerintah terhadap PDB pada tahun

$e_t$  = error terms

Hasil dan Kesimpulan Penelitian ini adalah :

Terdapat hubungan yang positif pengeluaran konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian. Hal ini dikarenakan pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran investasi pemerintah mempunyai dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pengeluaran investasi pemerintah dimaksudkan guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dan anggaran pembangunan dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat.

## **2. Jamzani Sodik (2007),**

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (studi kasus data panel di Indonesia).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional periode 1993-2003 dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, angkatan kerja dan tingkat keterbukaan ekonomi regional. Sedangkan investasi swasta tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

### **3. Sri Palupi (2002)**

Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi kasus di Kabupaten Purworejo).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah secara umum ternyata disebabkan oleh pertumbuhan pada pengeluaran rutin pemerintah yang menunjukkan hasil yang positif dan meyakinkan. variabel investasi swasta, pengeluaran rutin pemerintah, pengeluaran pembangunan pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### **4. Fajar Wardhany (2010)**

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Faktor Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Batang.

Model ekonometrik penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{LogGR = b_0 + b_1LogTK + b_2LogPR + b_3LogPP + Et}$$

Keterangan :

GR = Pertumbuhan Ekonomi (variabel dependen)

$\beta_0$  = Intersep atau Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien Regresi

TK = Tenaga Kerja

PR = Pengeluaran Rutin Pemerintah Daerah

PP = Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah

Log = Logaritma

Et = Gangguan Stokhastik (Disturbance Term)

## **5. Imron Rosyadi (2000)**

Dalam penelitian yang berjudul hubungan antara Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi selama periode 1979-1998. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang diestimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan menerapkan model kausalitas koreksi kesalahan (ECM).

Analisis dilakukan terhadap data sekunder berupa PDRB Kota Jambi berdasarkan harga konstan (tanpa migas) dan Pengeluaran Pembangunan Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat pola hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pembangunan. Dalam jangka pendek pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.